

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA KELURAHAN SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

Kasmiyah¹, Abubakar Iskandar², Rusliandy³

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor,

²Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, abubakar.iskandar@unida.ac.id

³Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, rusliandy@unida.ac.id

ABSTRACT

Kelurahan is in form based on Regent's Regulation Number. 73 of 2016 on Sub-District as a Sub-District Device based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number. 18 of 2016 on Regional Devices. In Article 52 it is explained that district is a Kecamatan device established to assist and carry out part of the leader of regions duties. The formulation of this research problem is the low effectiveness of Civil State Apparatus (ASN) Kelurahan, allegedly not implemented Implementation Policy. The reason for the effectiveness of low ASN work is seen from the quality of human resources and the policy is not implemented as planned. In the implementation of the policy of Regent Regulation Number. 73 Year 2016 still found problems related to the Effectiveness of Civil State Apparatus Work. Implementation of Bupati Regulation Policy Number.73 of 2016 must be synergized with both the main factor and supporting factors, the aspect starts from the implementation of the success of the Policy Implementers with the aspects of Communication, Resources, Attitudes and Structure Bureaucracy mutually support each other so that the effectiveness of civil apparatus district State increased even better according to Regent Regulation Number. 73 years 2016.

Keywords: Effectiveness, policy implementation, employee performance

ABSTRAK

Kelurahan di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016 tentang Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Pasal 52 dijelaskan bahwa Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat. Rumusan masalah penelitian ini adalah rendahnya efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan, diduga belum dilaksanakannya Implementasi Kebijakan. Alasan Efektivitas kerja ASN rendah dilihat dari kualitas SDM dan kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana. Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016 masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara Kelurahan. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor.73 Tahun 2016 harus saling bersinergis dengan baik antara Faktor utama dan factor pendukung , aspek tersebut dimulai dari pelaksanaan keberhasilan Pelaksana Kebijakan dengan aspek Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Birokrasi Satu sama lain saling mendukung sehingga efektifitas kerja Aparatur Sipil Negara Kelurahan meningkat lebih baik lagi sesuai Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016.

Kata kunci: Efektifitas, implementasi kebijakan, kinerja pegawai.

PENDAHULUAN

Kelurahan di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016

tentang Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Pasal 52 dijelaskan bahwa Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.

Organisasi yang efektif akan tercapai bila memiliki sumber daya manusia yang dapat bekerja secara efektif. Efektivitas kerja merupakan keluaran atau output dari kemampuan proses kerja yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum. Efektivitas kerja yang diwujudkan dapat dilihat atau diketahui, apakah tujuan kerja itu berkualitas atau tidak dan apakah sesuai rencana atau tidak. Gibson (1996 : 49) mengatakan: "Efektivitas kerja pegawai adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen". Artinya efektivitas kerja merupakan suatu konsep kerja yang ingin dicapai suatu organisasi. Demikian pula pada Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong, dipandang perlu untuk mencapai efektivitas kerjanya kearah yang lebih baik, karena selama ini Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan belum menunjukkan kemajuan dan peningkatan efektivitas kerja kearah yang lebih baik. Sangatlah wajar apabila dinyatakan bahwa efektivitas kerja ASN Kelurahan masih rendah. Rendahnya efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diduga belum dapat mengimplementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan tahapan yang sangat penting. Menurut Udoji

dalam Wahab (2004 :59) : "Implementasi Kebijakan bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, karena kebijakan hanyalah berupa impian atau cetak biru saja kecuali kebijakan tersebut diimplementasikan".

Berhasil tidaknya Implementasi Kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan seperti sumber daya, personil, manajemen serta aturan, dan disisi lain oleh lingkungan kebijakannya.

Berdasarkan pengamatan awal Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan dalam melaksanakan tugas masih rendah. Rendahnya efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) rendah dilihat dari indikator tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar tertentu, contohnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan dalam mengumpulkan data sering melakukan kesalahan, sehingga harus berulang-ulang untuk diperbaiki.
2. Ketepatan waktu rendah dilihat dari indikator target waktu, contohnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan yang seharusnya melaporkan laporan bulanan setiap tanggal 5, tetapi kenyataannya tidak sesuai target waktu kadang-kadang tanggal 10 setiap bulannya.

Berdasarkan indikator-indikator masalah tersebut diduga penyebab masalahnya adalah belum dijalankannya Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 yang belum sesuai dengan faktor implementasi kebijakan. Selanjutnya untuk melihat masalah secara mendalam, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam lingkup "**Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016 Terhadap Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor**".

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini yaitu Efektivitas kerja Kelurahan masih rendah. Hal ini diduga disebabkan /dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan yang belum diterapkan secara efektif. Dari pernyataan masalah tersebut di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan (*problem identifications*) penelitian sebagai berikut:

1. Sejuahmana Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan mengenai Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016?
2. Sejuahmana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016 terhadap Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan Cibinong?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *explanatory survey* melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitiannya bersifat vertifikasi karena melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan bentuknya, ditempatkan pada penelitian kausalitas (hubungan sebab akibat atau pengaruh) dimana hal tersebut ditunjukkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel bebas (X) Implementasi Kebijakan terhadap variable terikat (Y) yaitu Efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara. Penggunaan metode penelitian ini, memiliki dasar pertimbangan adanya asumsi permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan akan berakibat terhadap Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan. Titik pangkal atau permasalahan pokok adalah yang berkaitan langsung dengan Efektivitas Kerja, adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada analisis terhadap masalah-masalah kebijakan yang mendasar, sehingga semuanya dapat direkomendasikan kepada Aparatur Sipil Negara Kelurahan dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Paradigma penelitian merupakan landasan peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel yang menjadi objek penelitian. Objek didalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan se- Kecamatan Cibinong. Berdasarkan Judul penelitian Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 terhadap Efektifitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong, maka variabel penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua variabel, yaitu:

Tabel : 3.1.
Operasional Variabel Bebas (X)
Implementasi Kebijakan

VARIABEL	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Implementasi Kebijakan. Edward III. dalam Iskandar (2005:221)	Komunikasi	1. Transnsri 2. Kejelasan 3. Konsistensi	Likert
	Sumber Daya	1. Aparat 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas	
	Skap	1. Kepribedian 2. Faktor luar 3. Ketinggian	
	Struktur Birokrasi	1. SOP 2. Fragmentasi	

Tabel 3.2
Operasional Variabel (Y)
Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

VARIABEL	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
EfektivitasKerja Stres dalam Jamim (2004 : 151)	Ketepatan Kuantitas	1. Sesuai volume kerja 2. Kapasitas kerja 3. Sesuai harapan	Likert
	Ketepatan Kualitas	1. Memenuhi standar kerja 2. Tepat penggunaan 3. Sesuai jadwal	
	Ketepatan waktu	1. Cermat waktu 2. Target waktu 3. Pemanfaatan waktu	

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek dan obyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang diterapkan dalam penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya berdasarkan Sugiyono (2014), penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan total quota sampling dengan mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan se- Kecamatan Cibinong. Populasi

penelitian ini diambil dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan yang menduduki jabatan Eselon IV.B sebagai Kepala Seksi sebanyak 35 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Responden Penelitian Populasi Aparatur Sipil Negara Kelurahan Berdasarkan Jabatan Kepala Seksi

NO	Unit Kerja	JUMLAH
1	Kasi Pemerintahan	12 Orang
2	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	12 orang
3	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	11 orang
JUMLAH TOTAL RESPONDEN		35 orang

Sumber : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 2017

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi atau data pengumpulan data melalui ;

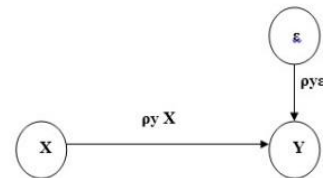
1. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan mempelajari literatur- literatur dan catatan kuliah.
2. Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan metoda-metoda sebagai berikut : Observasi secara partisipan, wawancara, dan angket.

Analisis data dalam penelitian ini adalah Path Analisis, yaitu untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data yang dipergunakan sesuai dengan tehnik pengumpulan data yaitu melalui pengumpulan instrumen penelitian berupa angket dengan menggunakan teknik pengukuran *Skala Likert*.

Sebelum angket digunakan untuk pengumpulan data, maka terlebih dahulu diuji validitas melalui *construct Validity* dan reabilitas melalui internal *Consistency-test*. Secara operasional uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor untuk setiap item dengan skor total.

Desain penelitiannya menjabarkan berbagai variable yang akan diteliti, kemudian membuat pengaruh satu

variable terhadap variable lainnya, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitian, pemilihan teori, rumusan hipotesis, metode penelitian, instrument penelitian, teknik analisis dan kesimpulan yang diharapkan. Desain penelitian secara konseptual diterjemahkan kedalam diagram paradigma penelitian dibawah ini:

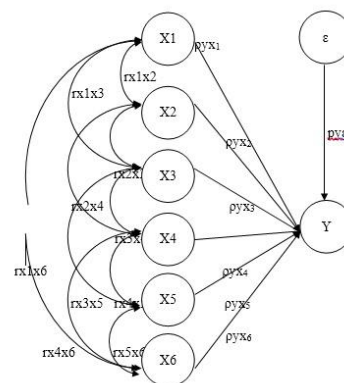


Gambar 2 Desain Variabel Penelitian

Keterangan :

- X = Variabel Implementasi kebijakan
- Y = Variabel Kinerja Pegawai
- ρ_{yx} = Koefisien X dan Y
- ϵ = Variabel yang mempengaruhi di luar variabel yang diteliti
- $\rho_{y\epsilon}$ = Koefisien variabel residu / epsilon

Sementara diagram parsialnya dikemukakan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Berdasarkan gambar korelasi antara variabel x ke y dapat dilihat besarnya koefisien jalur antara variabel bebas terikat x1, x2, x3, x4, ke Y. Menurut data yang tersusun, tahap selanjutnya menentukan total skor untuk masing-masing variabel, karena skor merupakan data yang terbentuk ordinal. Untuk keperluan perhitungan selanjutnya data tersebut perlu ditransformasikan ke dalam bentuk data interval dengan menggunakan **Method of Successive Interval**. Setelah itu nilai nilai skor untuk variable diakumulasikan dan tahap akhir

dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis jalur (**Path Analysis**).

Pengaruh variabel penyebab $P_{yx_1X_1}$, $P_{yx_2X_2}$, $P_{yx_3X_3}$, $P_{yx_4X_4}$, terhadap y diperlihatkan oleh besar parameter strukturnya ($P_{yx_iX_i}$). Besarnya pengaruh variabel $P_{yx_1X_1}$, $P_{yx_2X_2}$, $P_{yx_3X_3}$, $P_{yx_4X_4}$, terhadap y ditentukan dengan modifikasi dari Al-Rasjid dalam Sitepu (1994:19-20) yaitu :

$$r_{yx_i} = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[N \sum x^2 (\sum x)^2 - (\sum x)^2] [N \sum y^2 (\sum y)^2 - (\sum y)^2]}}$$

Ciri : Unsur pada baris ke-i dan kolom ke-i dari matriks invers korelasi

r_{yxi} : Dapat ditentukan dengan rumus Sitepu (1994:23), sebagai berikut :

$$p_{yx_i} = \sum_{i=1}^4 CR_{ii} r_{yxi}$$

Pengaruh variabel lainnya dapat ditentukan melalui rumus Sitepu (1994:23) sebagai berikut :

$$p_{xy_1} = \sqrt{1 - r^2_{yx_1}}$$

Dalam hal ini :

$$R^2_{yx_1} = \sum p_{yx_i} r_{yxi}$$

Berdasarkan pengaruh langsung setiap variabel bebas diperlihatkan oleh besarnya koefisien jalur.

Suatu alat ukur yang tinggi validitasnya akan memiliki eror pengukuran yang kecil, artinya skor setiap subyek yang diperoleh alat ukur tersebut tidak jauh beda dari skor sesungguhnya. Dengan demikian secara keseluruhan alat tes yang bersangkutan akan menghasilkan *varians error* yang kecil pula, ukuran dari validitas ditentukan oleh tingkat hubungan atau tingkat keeratan (korelasi) antara item – item yang ada dengan jumlah skornya dengan menggunakan rumus *product moment*, (Arikunto, 1993:19) sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sqrt{\left(X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}\right) \left(Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}\right)}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi person antara item dengan variabel yang bersangkutan
- X = Skor item dalam variabel
- Y = Skor semua item dalam variabel tersebut
- n = jumlah responden

Tujuan dari uji validitas angket adalah melihat sejauh mana keterkaitan antara variabel manifens (indicator) yang menerangkan variabel latennya (subvariabel), untuk variabel manifens yang tidak mempunyai hubungan atau hubungannya sangat kecil sekali terhadap variabel laten direduksi, sehingga variabel – variabel manifens yang membentuk variabel – variabel lain yang sesuai dengan penelitian merupakan variabel laten yang dibentuknya. Pengujian ini bertujuan mengetahui keandalan alat ukur yang digunakan. Keandalan ini menunjukkan ketepatan dan homogenitas angket yang digunakan sebagai alat ukur. Metoda yang digunakan untuk menguji Realibilitas (keandalan) alat ukur pada penelitian ini digunakan *interval consistency* dengan tehnik belah dua (*split half*) dari Spearman-Brown (Sugiono, 2008:109)

PEMBAHASAN

A. PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR. 73 TAHUN 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KELURAHAN SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN CIBINONG

Berdasarkan total jawaban responden terhadap item pernyataan tentang variable Implementasi kebijakan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 4.3.33

Total Jawaban Responden Variabel Implementasi kebijakan

No	Kriteria	Frekuensi	Persen (%)
1	Sangat tidak setuju	0	0
2	Tidak setuju	5	1.190476
3	Cukup Setuju	9	2.142857
4	Setuju	220	52.38095
5	Sangat setuju	186	44.28571
	Jumlah	420	100

Berdasarkan Tabel 4.3.33 tersebut diketahui bahwa total jawaban responden terhadap variable implementasi

kebijakan, yang paling dominan adalah menjawab setuju sebesar 52%, sangat setuju 44%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator penelitian.

Berdasarkan total jawaban responden terhadap item pernyataan tentang variable efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 4.3.35
Total Jawaban Responden terhadap Variabel efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (Y)

No	Kategori	Frekuensi	Persen (%)
1	Sangat tidak setuju	1	0.350877
2	Tidak setuju	5	1.754386
3	Netral	8	2.807018
4	Setuju	150	52.63158
5	Sangat setuju	121	42.45614
	Jumlah	285	100

Berdasarkan Tabel 4.3.35 tersebut diketahui bahwa total jawaban responden terhadap variabel efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara yang paling dominan adalah menjawab setuju sebesar 52%, sangat setuju setuju 42%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator penelitian, namun perlu ditingkatkan lagi, karena masih ada jawaban yang cukup setuju/ragu-ragu dari responden.

B. ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR. 73 TAHUN 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA KELURAHAN SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN CIBINONG

Korelasi

Pada bagian ini akan diestimasi dan diuji pengaruh implementasi kebijakan (X) terhadap efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (Y) Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong, dengan menggunakan regresi linear sederhana.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 21.0 di peroleh hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4.3.41
Korelasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.814	1.640		.496	.623
	implementasi kebijakan	.737	.031	.972	23.791	.000

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.3.41 maka dapat dibentuk model prediksi variabel implementasi kebijakan (X) terhadap efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (Y) sebagai berikut :

$$Y = 0.814 + 0,972 X$$

Tanda Koefisien regresi ini adalah positif, maka setiap peningkatan implementasi kebijakan (X) diprediksi akan meningkatkan efektivitas kerja sebesar 0,972 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Analisis Regresi Sederhana

Korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui derajat hubungan yang terjadi antara implementasi kebijakan (X) terhadap efektivitas kerja (Y). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai constanta adalah 0.814 dan efektivitas kerja sebesar 0.972, menunjukkan bahwa setiap perubahan satu satuan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 akan berpengaruh sebesar 0.972 efektivitas kerja. Sedangkan Nilai R pada tabel 4.3.32 menunjukkan kekuatan implementasi kebijakan (X) terhadap efektivitas kerja (Y). Hasilnya diketahui bahwa secara simultan variabel bebas memiliki hubungan yang kuat dengan implementasi kebijakan. Hal ini terlihat dari korelasi ganda (R) sebesar 0,972 berada diantara 0,8 hingga 0,9 yang termasuk dalam kriteria korelasi sangat kuat.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan, berpengaruh terhadap efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut.

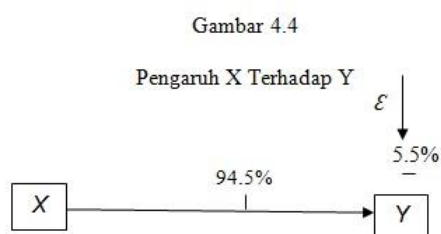
Tabel 4.3.42
Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.945	.943	.83087	2.091

a. Predictors: (Constant), implementasi kebijakan
b. Dependent Variable: efektivitas kerja

Sementara nilai *R-Square* sebesar 0,945 menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada efektivitas kerja sebesar 94.5%. Sisanya pengaruh variabel lain yang tidak diamati sebesar 5.5%, yaitu mungkin merupakan pengaruh dari faktor lain.



Adapun secara parsial pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016 terhadap efektivitas kerja dapat dijelaskan sebagaimana pada gambar sebagai berikut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong, maka usia responden bahwa usia responden terhadap Aparatur Sipil

Negara Kelurahan yang memiliki usia 21 – 30 berjumlah 2 orang dengan persentase 6.67%, 31 – 40 berjumlah 3 orang dengan persentase 10%, 41 – 50 berjumlah 22 orang dengan persentase 56.67%, ≥5 berjumlah 8 orang dengan persentase 26.67%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong, berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa jenis kelamin terhadap Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong adalah laki-laki berjumlah 8 Orang dengan persentase sebesar 26.67% sedangkan perempuan berjumlah 27 Orang dengan persentase sebesar 73.33%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong, maka tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa responden terhadap Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong, yang memiliki pendidikan S2 berjumlah 4 orang dengan persentase 11.43%, S1 berjumlah 10 orang dengan persentase 28.57%, D3 berjumlah 6 orang dengan persentase 18.14%, SMA/Sederajat berjumlah 15 orang dengan persentase 42.86%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong, mengenai lamanya masa kerja dapat dilihat bahwa lama masa kerja responden terhadap Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong berdasarkan lamanya masa kerja 1 – 10 berjumlah 5 orang dengan persentase 6.67%, 11 – 20 berjumlah 8 orang dengan persentase 26.67, 21 – 30 berjumlah 12 orang dengan persentase 40%, ≥31 berjumlah 5 orang dengan persentase 16.67%.

Hasil Uji Validitas dapat diketahui bahwa semua pernyataan untuk variabel implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016 (X) telah

memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang dibutuhkan, atau dengan kata lain dinyatakan valid. Dan dapat diketahui bahwa semua pernyataan untuk variabel efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (Y) telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang dibutuhkan, atau dengan kata lain dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa semua variabel dengan berbagai item pertanyaan dikatakan reliabel, karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari pada r kritis, yaitu 0,7.

Berdasarkan resume skor variabel implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 rata-rata total skor variabel adalah sebesar 65.60 pada kategori baik. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator penelitian.

Berdasarkan skor variabel efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara rata-rata total skor variabel efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara adalah sebesar 63.90 pada kategori baik. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator penelitian, namun demikian perlu dilakukan perbaikan karena masih ada responden yang menjawab cukup

Berdasarkan analisis jawaban responden terhadap item pernyataan tentang variable Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 dapat diketahui bahwa total jawaban responden terhadap variabel implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016, yang paling dominan adalah menjawab setuju sebesar 52%, sangat setuju 44%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator penelitian.

Berdasarkan analisis jawaban responden terhadap item pernyataan tentang variable efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara dapat diketahui bahwa total jawaban responden terhadap variabel efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara yang paling dominan adalah menjawab setuju sebesar 52%, sangat setuju 42%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas kerja pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator penelitian, namun perlu ditingkatkan lagi, karena masih ada jawaban yang cukup setuju/ragu-ragu dari responden.

Berdasarkan uji pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 (X) terhadap efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (Y) Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong dapat diketahui tanda koefisien regresi ini adalah positif, maka setiap peningkatan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016 (X) diprediksi akan meningkatkan efektivitas kerja sebesar 0,972 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa setiap perubahan satu satuan implementasi kebijakan akan berpengaruh sebesar 0.972 efektivitas kerja. Sedangkan Nilai R pada tabel 4.32 menunjukkan kekuatan implementasi kebijakan (X) terhadap efektivitas kerja (Y). Hasilnya diketahui bahwa secara simultan variabel bebas memiliki hubungan yang kuat dengan implementasi kebijakan. Hal ini terlihat dari korelasi ganda (R) sebesar 0,972 berada diantara 0,8 hingga 0,9 yang termasuk dalam kriteria korelasi sangat kuat.

Berdasarkan koefisien determinasi diketahui bahwa system informasi Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016, berpengaruh terhadap efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara dimana nilai R -Square sebesar 0,945 menunjukkan variabel bebas yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 tahun 2016

mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada efektivitas kerja sebesar 94.5%. Sisanya pengaruh variabel lain yang tidak diamati sebesar 5.5%, yaitu mungkin merupakan pengaruh dari faktor lain.

SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Dharma, Surya, 2005, Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dunsire, 1978, Pengantar Kebijakan Publik, Yogyakarta, UGM Press.

Edward, C. George, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington DC, Congressional Quarterly Press.

Fathoni, Abdurrahmat, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Gibson, James L and Ivanceic, John M and Donnely Jr, 1996, Organisasi Perilaku Struktur Proses, Alih Bahasa, Nunuk Adriani, Binarupa Aksara Jakarta.

Gunn, 1986, The Studi of Implementation, New York, Prentice Hall.

Islamy, M. Irfan, 2004, Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Iskandar, 2005, Kebijakan Publik, Jakarta, Graha Ilmu.

Indrawijaya, Adam Ibrahim, 2000, Perilaku Organisasi, cetakan ketiga, Sinar Baru Bandung.

Jackson, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Salemba Empat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan saran Sebaiknya efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan Cibinong lebih ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016 secara konsisten.

Robbins, Stephen P, 2003, Perilaku Organisasi, Alih Bahasa Tim Indeks, PT Indeks Kelompok Gramedia Jakarta.

Siagian, Sondang P, 1998, Manajemen Abad 21, Bumi Aksara, Jakarta

Silalahi, Ulbert, 2002, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung, Sinar Baru Grafindo.

Sitepu, 1994, Statistik Sosial. Bandung, UNPAD.

Solihin, 2005, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang, Univ. Muhamadyah.

Steers, Richard, M. 1988, Efektivitas Organisasi, Seri Manajemen No 47, Penterjemah, M. Jamin, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.

Thoha, Miftah, 2005, Dimensi dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahab, Solihin A, 2004, Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara, Jakarta.

Wibawa, 1994, Evaluasi kebijakan Publik, Jakarta, Raja Grafindo.

Rivai, Veithzal, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk

Perusahaan, Dari Teori Ke Praktek, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.

Ilyas, Yaslis, 2005, Kinerja, Teori dan Penelitian, Liberty, Yogyakarta.

Simamora, Hendry, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE,YKPN, Jogjakarta.

Ruchimat (2010) “ Pengaruh Implementasi Kebijakan Dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi”.

Santosa (2006) “ Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tentang Bangunan dan Sikap Warga Masyarakat terhadap Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Untuk Terwujudnya Tertib Bangunan di Kota Bandung”.

Sumber lain:

Profil Kecamatan Cibinong Tahun 2017

Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.